

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN
AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA PADA
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak)*

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : Azizun Jabbar Siagian
NPM : 1905170323
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN**

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : AZIZUN JABBAR SIAGIAN
N P M : 1905170323
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(IRFAN, S.E., M.M., Ph.D)

Penguji II

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA)

PANITIA UJIAN

Ketua



(Dr. HAKIM NURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : AZIZUN JABBAR SIAGIAN
N.P.M : 1905170323
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Azizun Jabbar Siagian
 NPM : 1905170323
 Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., M.Si, Ak, CA
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Tambah teori variabel, teori karakteristik variabel, Indikator variabel, fenomena permasalahan	21 / 09 / 2023	
Bab 2	- Tambah teori yang terbaru - Penelitian terdahulu	21 / 09 / 2023	
Bab 3	- Buatlah tabel untuk populasi dan sampel	21 / 09 / 2023	
Bab 4	ok.		
Bab 5	ok.		
Daftar Pustaka	ok.		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc.		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, April 2024
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.Si, Ak, CA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizun Jabbar Siagian
NPM : 1905170323
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



AZIZUN JABBAR SIAGIAN

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN

Oleh :

Azizun Jabbar Siagian

azizinjabbar12@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, dan aktivitas pengendalian secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat kantor kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi praktisi, peneliti, dan pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Aktivitas Pengendalian, Akuntabilitas Kinerja, Kantor Kecamatan, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM IMPLEMENTATION, CLARITY OF BUDGET TARGETS, AND CONTROL ACTIVITIES ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN MEDAN PERJUANGAN SUB-DISTRICT, MEDAN CITY

By:

Azizun Jabbar Siagian
azizinjabbar12@gmail.com

This study aims to examine the influence of the implementation of the regional financial accounting system, clarity of budget targets, and control activities on performance accountability in the Medan Perjuangan Sub-district Office, Medan City. In this study, the author employs a quantitative approach. The results indicate that the implementation of the regional financial accounting system, clarity of budget targets, and control activities significantly affect performance accountability in the Medan Perjuangan Sub-district Office, Medan City. These findings provide a deeper understanding of the factors influencing performance accountability in regional financial management at the sub-district office level. Thus, this study contributes significantly to practitioners, researchers, and decision-makers in efforts to improve the effectiveness and efficiency of regional governance.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Clarity of Budget Targets, Control Activities, Performance Accountability, Sub-district Office, Regional Governance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul Penelitian yaitu "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan".

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada laporan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa.

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada Kedua orang tua, Bapak Indra Utama Siagian dan Ibu tercinta Susy Wataty Ayu Ritonga yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, serta doa yang tulus kepada penulis dalam penyelesaian proposal ini dan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan laporan proposal skripsi ini, diantaranya :

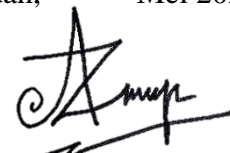
1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing saya.
8. Bapak Sukma Lesmana S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan magang ini, semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Mei 2024



Azizun Jabbar Siagian
1905170323

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.2.1. Akuntabilitas Kinerja.....	12
2.2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	18
2.2.3. Kejelasan Sasaran Anggaran	25
2.2.4. Aktivitas Pengendalian	29
2.2. Penelitian Terdahulu	33
2.2.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja	37
2.2.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja 38	
2.2.3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja	39
2.3. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Definisi Operasional.....	42
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3.1. Tempat Penelitian.....	44
3.3.2. Waktu Penelitian	44
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	45

3.4.1. Populasi	45
3.4.2. Sampel	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data	46
3.6. Metode Analisis Data	47
3.6.1. Metode Pengolahan Data	47
3.6.2. Analisis <i>Outer Model</i>	48
3.6.3. Analisis <i>Inner Model</i>	49
3.6.4. Pengujian Hipotesis	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Penelitian	52
4.2 Hasil Penelitian	52
4.2.1 Outer Model (Pengukuran Model)	52
4.2.2 Inner Model (Model Struktural)	59
4.2.3 Hipotesis	60
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja	61
4.3.2 Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja	62
4.3.3 Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja ..	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Kesimpulan	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	44
Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Kantor Camat Medan Perjuangan	45
Tabel 3. 4 Pedoman Skor Jawaban Butir Angket	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	40
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu organisasi sektor publik tidak dapat semata-mata dinilai dari segi keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Mengingat karakteristik dasarnya yang tidak bertujuan mencari keuntungan, penilaian keberhasilan organisasi sektor publik seharusnya mencakup pengukuran kinerjanya. Pendekatan anggaran kinerja konsisten dengan prinsip ini, di mana anggaran tidak hanya mencakup angka-angka tetapi juga menyertakan target kinerja kualitatif. Pertanggungjawaban organisasi tidak hanya ditentukan oleh laporan keuangan, melainkan juga harus disertai dengan laporan kinerja (Andika Sari, 2017).

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dalam konteks organisasi sektor publik, melakukan pengukuran kinerja bukanlah tugas yang mudah, sebagian karena tidak ada metode atau pendekatan yang standar untuk melakukannya (Fauzi, 2020). Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Lesmana & Lufriansyah (2019) Kinerja merujuk pada evaluasi pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai sasaran, Tujuan, Misi, Dan Visi Sebuah Organisasi.

Lesmana & Lufriansyah (2019) juga menyatakan bahwa kinerja sektor publik harus dievaluasi berdasarkan pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Hal ini menekankan pentingnya memahami bahwa kinerja organisasi sektor publik tidak

hanya terbatas pada dimensi finansial, melainkan juga pada dampak yang dihasilkan dalam mencapai tujuan publik.

Keberhasilan suatu organisasi sektor publik tidak dapat disederhanakan semata-mata dengan melihat surplus atau defisit dalam laporan keuangan. Sebagai entitas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, penilaian keberhasilan organisasi sektor publik harus mencakup evaluasi kinerjanya secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan anggaran kinerja menjadi relevan, di mana pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada angka-angka keuangan, tetapi juga mencakup target kinerja. Laporan kinerja menjadi komponen penting dalam menilai pertanggungjawaban organisasi, melampaui sekadar laporan keuangan.

Untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terdapat beberapa faktor, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang dihasilkan terintegrasi dan lebih jelas penggunaan anggaran dan mudah dipahami serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya (Hanum & Ultari, 2019).

Pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel sangat terkait dengan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Anggaran memiliki peran krusial dalam konteks pemerintahan daerah, terutama dalam dampaknya terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, yang tercermin dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan

sasaran anggaran yang terdefinisi dengan baik memudahkan perumusan target-target anggaran oleh individu terkait (E. Sinambela et al., 2018). Kehadiran sasaran anggaran yang jelas, serta kemudahan dalam menetapkan target anggaran, berpotensi mencegah terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahunnya, yang mungkin disebabkan oleh ketidakcapaian program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Untuk mencapai performa yang optimal dalam sektor publik, perlu diterapkan sistem akuntansi yang efisien oleh instansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan bahwa laporan tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, memenuhi kriteria kebenaran dan kewajaran. Hal ini bertujuan agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diandalkan oleh pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mencakup serangkaian langkah, baik secara manual maupun terkomputerisasi, yang melibatkan pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran, hingga pembuatan laporan mengenai posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah (Mahmudi, 2016). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah fungsinya sangat penting untuk memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah & Sabeni, 2007). Sistem ini berperan sebagai penyimpanan dokumentasi serta pengolah data keuangan daerah mulai dari tahap pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan. Hasilnya adalah informasi keuangan

yang disajikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat (Indraswarawati et al., 2020). Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemerintahan Daerah.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah & Sabeni, 2007). Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah juga melibatkan aspek kejelasan anggaran, yang memiliki keterkaitan dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah. Salah satu atribut penting dari anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana anggaran dirumuskan dengan secara terperinci dan spesifik, dengan maksud agar tanggung jawab terhadap pencapaian anggaran dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab (Melia & Sari, 2019). Dalam kerangka kerja pemerintah daerah, sasaran anggaran ini terintegrasi dalam dokumen Rencana Strategik Daerah (Prestrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Kehadiran sasaran anggaran yang terdefinisi secara cermat memberikan kemudahan bagi individu dalam menetapkan target-target anggaran, sehingga rencana anggaran yang disusun dapat lebih terarah dan presisi. Dengan demikian, diharapkan setiap tahun tidak akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akibat ketidakcapaian program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran juga terkait dengan akuntabilitas keuangan. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical repoting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability* (Purba & Amrul, 2018). Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah mengubah pola pertanggungjawaban kepada para pemiliknya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.

Selain itu, perlu juga diterapkannya aktivitas pengendalian untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Agar memudahkan organisasi untuk memantau suatu organisasi dalam menjalankan setiap kegiatannya. Pengendalian sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dan anggaran yang keluar dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya telah direncanakan sehingga tujuan anggaran dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Masih banyak kelemahan dalam sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintahan. Hal itu bisa dilihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan tentu akan berdampak pada akuntabilitas kinerja.

Medan Perjuangan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan adalah ibu kota provinsi tersebut dan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Sebagian besar kecamatan di Medan memiliki beragam fasilitas, seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, sekolah, dan berbagai layanan publik. Dalam menjalankan pemerintahannya, kecamatan Medan Perjuangan dituntut untuk mampu memberikan kinerja terbaik dan akuntabel mengingat hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintahan terkait. Untuk melihat kinerja pemerintah di Kecamatan Medan Perjuangan dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
2018	Rp. 23.621.178.781,00	Rp. 21.536.600.628,00	91,17 %
2019	Rp. 26.044.920.602,00	Rp. 19.126.029.380,00	73,43 %

2020	Rp. 20.401.186.295,00	Rp. 18.028.830.435,00	88,37 %
2021	Rp. 36.981.215.536,00	Rp. 28.843.829.319,00	78,00 %
2022	Rp. 35.275.820.944,00	Rp. 33.563.405.101,00	95,15 %

Sumber : Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja pemerintahan di Kecamatan Medan Perjuangan masih belum mencapai 100% bahkan mengalami penurunan di beberapa tahun. Dimana, realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 73% mengalami penurunan 18% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 91%. Namun, di tahun 2020 terjadi kenaikan 15% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88%. Kemudian, di tahun 2021 terjadi penurunan kembali sebesar 10% dengan capaian kinerja 78%. Lalu, di tahun 2022 mengalami peningkatan 17% dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 95%. Meskipun terdapat peningkatan capaian kinerja menjadi 95,15%, namun perhatian perlu diberikan terhadap selisih antara anggaran dan realisasi anggaran yang masih signifikan. Meskipun capaian kinerja meningkat, realisasi anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, menunjukkan potensi masalah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, perlu dicermati juga bahwa terdapat penurunan anggaran dari tahun sebelumnya, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan proyek yang direncanakan.

Penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dapat terjadi dikarenakan masih banyak rencana program kerja yang belum dapat direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan kecamatan Medan Perjuangan belum optimal. Disamping itu, hal ini juga dikarenakan masih kurangnya pemantauan dan pengendalian anggaran yang dilakukan sumber daya manusia dalam pemanfaatan ruang di lingkungan Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Sebagai

contoh belum ada sebuah pengaturan mengenai tentang cara untuk melakukan pengawasan, mengevaluasi, dan membuat pelaporan, dan juga belum adanya peraturan untuk menentukan kriteria sebuah permasalahan khusus.

Disamping itu, berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa pemerintah kecamatan Medan Perjuangan belum memenuhi indikator dikarenakan pemerintahan Kecamatan Medan Perjuangan belum mampu memberikan kejelasan anggaran melalui pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability* sehingga masyarakat tidak mengetahui alokasi anggaran diwilayah mereka.

Penelitian terdahulu terkait topik yang sama juga pernah dilakukan diantaranya, Ramadhani (2020) menyatakan bahwa bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Disisi lain, menurut Ardiyan & Binawati (2019) sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya akuntabilitas keuangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan maka diidentifikasi masalah adalah akuntabilitas kinerja dari tahun 2018 sampai dengan 2022 belum adanya peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya, masih mengalami kenaikan dan penurunan dalam capaian kerjanya

1. Capaian kinerja pemerintahan di Kecamatan Medan Perjuangan masih belum optimal
2. Kurangnya pemantauan dan pengendalian anggaran yang dilakukan sumber daya manusia dalam pemanfaatan ruang di lingkungan Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
3. Kurangnya transparansi pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat luas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
3. Apakah Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Aktivitas Pengendalian Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
4. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja secara bersama-sama (simultan) Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, melalui penelitian ini peneliti dapat mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

2. Bagi Pemerintahan, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya SKPD di Medan dalam rangka mewujudkan good governance.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.2.1. Akuntabilitas Kinerja

A. Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Halim (2022) “akuntabilitas mempunyai arti “pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “good governance” atau pengelolaan pemerintah yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “clean government” atau pemerintahan yang bersih”. Disamping itu, Trihantoyo (2015) menyatakan Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan aktifitas/ program sekolah, dimana kinerja sekolah terdiri dari komponen input-proses-output yang secara simultan saling berkait.

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai pemegang amanah rakyat, pemerintah tampak serius dan peduli terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menguraikan bahwa

akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sehubungan dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Aspek – aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga – lembaga publik dalam (Mahmudi, 2016) antara lain :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk bersikap jujur dalam tugas dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana masyarakat harus dilakukan dengan benar dan memiliki kewenangan. Akuntabilitas hukum bersangkutan dengan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam menggerakkan organisasi, sementara itu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, korupsi

dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut praktik organisasi yang sehat sehingga tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi serta tidak melakukan kebohongan publik.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik merupakan tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh ditanggung oleh klien atau pelanggannya.

3. Akuntabilitas Program

Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang sudah dibentuk sampai dengan pengoperasian program. Akuntabilitas program artinya program-program organisasi haruslah program-program yang bermutu bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar program pengeluaran anggaran yang tidak jelas.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan akuntabilitas lembaga publik atas kebijakan yang dicapai. Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam pengambilan kebijakan harus diperhatikan apa yang menjadi tujuan kebijakan, mengapa kebijakan diambil, siapa sasarannya, stakeholders mana saja yang akan

mendapatkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut, langkah apa yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas keuangan merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan uang rakyat (uang rakyat) secara ekonomis, efisien dan efektif, tanpa pemborosan dan kebocoran dana dan korupsi. Akuntabilitas keuangan menekankan pada anggaran dan ukuran keuangan. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat.

B. Tujuan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut antara lain :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan untuk menghasilkan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan dan

dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

C. Indikator Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan good government governance menggunakan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai alat pengendalian dan sebagai penilai kualitas kinerja. Kandungan yang terdapat dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki beberapa indikator yaitu (Asmawanti et al., 2020):

1. Perencanaan strategic

Perencanaan strategik adalah suatu proses perencanaan yang disusun berdasarkan harapan capaian hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Perencanaan tersebut tentunya berisi tentang rencana strategis instansi pemerintah, yang antara lain mengenai penjelasan Misi, visi, sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, dan program serta indikator keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan.

2. Terukur

Tujuan, sasaran dan target yang telah dirumuskan harus mampu diukur dengan jelas.

3. Sumber daya yang efektif dan efisien

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan instansi harus mampu menerapkan prinsip efektif dan efisien.

4. Mewujudkan visi dan misi

Dalam setiap rincian gambaran kinerja yang ingin dicapai, harus mampu diturunkan dari visi dan misi instansi pemerintah yang akan dicapai. Gambaran tersebut akan menjabarkan indikasi-indikasi penilaian atas tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama.

5. Sesuai Target

Ketercapaian target merupakan penjabaran atas pencapaian kinerja yang baik oleh instansi pemerintah tersebut.

6. Memberikan Manfaat

Memberikan manfaat dalam membangun dan mengembangkan system, sarana dan prasarana penanggulangan yang terpadu dan terorganisir.

7. Berjenjang dan berkala

Pegawai membuat laporan LAKIP secara berjenjang dan berkala dalam rangka berusaha untuk mencapai tujuan dan target instansi pemerintah.

8. Alat pertanggungjawaban

LAKIP di dalam OPD sebagai alat pertanggungjawaban yang disusun oleh penerima amanah kepada pemberi amanah.

9. Tepat waktu

LAKIP di OPD digariskan pegawai menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah tahun berjalan.

10. Alat evaluasi

Ketercapaian realisasi program kerja akan dapat dinilai dan dievaluasi dengan tujuan agar diketahui kendala, hambatan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Indikator yang digunakan diadopsi dari Reyhan (2017) yang juga diambil dari penelitian terdahulu yaitu dikutip Mardiasmo (2006:21), yaitu Untuk mengukur variabel ini digunakan indikator berupa :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, merupakan pelaporan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan.
2. Akuntabilitas Proses, merupakan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dengan menggunakan proses, prosedur dan ukuran – ukuran.
3. Akuntabilitas Pelaksanaan, merupakan pengamatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan efektif.
4. Akuntabilitas Program, merupakan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 - A. Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan

2.2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

A. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah mencakup berbagai tahapan, mulai dari pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam lingkup akuntansi sektor publik, khususnya pada tingkat pemerintah daerah, sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan menyajikan segala transaksi yang terkait dengan keuangan daerah. Serangkaian prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah melibatkan proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, hingga pelaporan

keuangan, semua itu bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Defitri, 2018).

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah & Sabeni, 2007). Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2014).

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry* (Purba & Amrul, 2018)

Salah satu yang membedakan antara pembukuan akuntansi adalah dalam menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut dengan akuntansi.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini dikenal dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada diisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan sisi kredit ada disebelah kanan. Dalam

melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami pencatatan sistem ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja. Hal sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan disisi kredit. Jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Cara melakukan pencatatan sistem double entry atau menjurnal ini adalah dengan mencatat sisi debit tepat disisi kiri dan mencatat sisi kredit agak menjorok ke kanan kira kira 1 – 2 cm.

Pada era reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry. Sistem ini akan terus dipertahankan di masa-masa mendatang walaupun peraturan perundangannya berubah.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *doubly entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *doubly entry* dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan dan biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Sementara menurut (Erlina, 2013) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

B. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan utama dari sistem akuntansi merupakan pemberian serangkaian informasi yang bersifat keuangan yang akan dipakai oleh pihak pemakai. (Ismail et al., 2016) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tujuan akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelapor sepanjang satu periode pelaporan.
2. Untuk memberikan informasi perihal sumber, distribusi dan penggunaan sumber daya keuangan.
3. Memberikan informasi perihal kecukupan pendapatan periode berjalan untuk mendanai semua biaya.

4. Memberikan informasi berkaitan besaran sumber daya ekonomi yang dilaksanakan dalam aktivitas entitas pelapor dan hasil yang telah diraih.
5. Memberikan informasi perihal cara entitas pelapor membiayai semua aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Memberikan informasi perihal posisi dan kondisi keuangan entitas pelapor sehubungan dengan sumber pendapatan, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.

C. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam menjalankan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdapat beberapa indikator yang menjadi prosedur dalam menjalan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari proses input hingga output agar berfungsi dengan baik (Superdi et al., 2015), yaitu :

1. Basis Akuntansi sebagai suatu kegiatan pada transaksi yang dilakukan dari pencatatan hingga pelaporan laporan keuangan.
2. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran. Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada sumber dan alokasi dana pemerintahan selama periode tersebut.
3. Penyusunan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah berkenaan uang dan barang harus dianggarkan dalam APBD.
4. Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan keuangan.

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut (Cahyati, 2016) yang. Indikator sistem akuntansi keuangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik.
3. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

2.2.3. Kejelasan Sasaran Anggaran

A. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Hanum & Farhan (2019), Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis yang mencerminkan sasaran, tujuan, dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan

Anthony dan Govindarajan (2005), mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Penyusunan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis.

Menurut Pratama et al., (2019), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas

pencapaian anggaran tersebut. Agar anggaran yang disusun lebih produktif, perlu adanya penetapan tujuan secara spesifik. Penetapan tujuan dengan spesifik akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran atau disebut dengan target merupakan hasil yang diinginkan dari suatu program keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 43).

Keluaran yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 43 adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dalam program dan kebijakan. Hasil yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dari suatu pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan (Pitasari et al., 2014). Pencapaian target anggaran akan lebih mudah tercapai apabila pihak penyusun anggaran mengerti mengenai rencana yang akan dilaksanakan

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana kerjakeuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahunnya disusun secara jelas dan spesifik dan merupakan desain teknis pelaksana, strategi untuk mencapai tujuan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran

daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi pemerintah daerah. (Aprilianti et al., 2020) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan realisasi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Uppa (2020) Kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Menurut Steers dan Porter (1976) dalam Samuel (2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu :

1. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai

B. Tujuan Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Nguyen (2018) manfaat kejelasan sasaran anggaran adalah:

1. Menghilangkan kejenuhan.
2. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.
3. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil yang dicapai.
4. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
5. Membangkitkan rasa mampu dalam berkerja sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja.
6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga apabila sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
7. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas.

C. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979) adalah:

1. Spesifik yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.

2. Mengerti yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.
3. Jelas yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda.

Disamping itu, menurut Wulandari et al., (2017) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan, membuat secara rinci rencana umum tugas-tugas yang harus dilakukan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam wujud pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau sasaran yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan tenggat waktu yang diperlukan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan target yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan target sesuai tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, kebutuhan dalam bekerjasama.

2.2.4. Aktivitas Pengendalian

A. Pengertian Aktivitas Pengendalian

Menurut Hery (2014), Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu dan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas.

Menurut Putri (2022), Aktivitas pengendalian adalah :

1. Kontrol administrasi

Pada struktur organisasi, prosedur, dan catatan yang melaksanakan transaksi yang diotorisasi manajemen. Otorisasi ini merupakan fungsi manajemen yang langsung menyangkut tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dan hal ini merupakan awal dalam melaksanakan accounting control atas transaksi perusahaan.

2. Kontrol Akuntansi

Meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

B. Tujuan Aktivitas Pengendalian

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Sinambela & Darmawan (2011) “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang

digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal di atas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

C. Indikator Aktivitas Pengendalian

Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Indikator dalam mengukur aktivitas pengendalian dikutip dari (Arens et al., 2015), meliputi :

1. Pemisahan tugas yang memadai

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada beberapa bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu : pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula, harusnya adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dengan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional).

2. Otorisasi yang tepat

Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Jika setiap orang dalam suatu organisasi dapat memperoleh ataupun mengeluarkan aset semua mereka maka akan terjadi kerusuhan besar.

3. Dokumentasi dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan merupakan objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan mengendalikan aktiva. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan dan memberikan tanda tangan kedalam dokumen, orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumen atas transaksi seharusnya dibuat ketika transaksi terjadi.

4. Pengendalian fisik atas aset

Untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, aktiva dan catatan harus dilindungi. Jika tidak diamankan sebagaimana mestinya, aktiva akan dicuri, diselewengkan, atau disalahgunakan

5. Pemeriksaan Independen

Kebanyakan sistem pengendalian intern memberikan pengecekan independen. Kebutuhan akan pengecekan independen muncul karena pengendalian internal cenderung berubah sepanjang waktu, kecuali sering dilakukan penelaahan. Personel sangat mungkin lupa atau tidak sengaja tidak mengikuti prosedur atau mereka menjadi sembrono kecuali jika ada seseorang yang mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Tanpa mempertimbangkan kualitas pengendalian para personel dapat melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	(Viola et al., 2023)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Regresi Linier Berganda	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, namun variabel pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

		(Studi Empiris Pada Skpd Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur		kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja pemerintah Kota Probolinggo.
2	(Ramadhani, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
3	(Ardiyan & Binawati, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh

		Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya akuntabilitas keuangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4	(Ronald, 2023)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan hasil Uji-t menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai signifikan sebesar 0,006, Sistem Pelaporan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 serta Partisipasi Masyarakat memiliki nilai signifikan 0,007. Kemudian dari hasil Uji- F dengan nilai signifikan 0,000
5	(Mukarromah, 2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan	Regresi Linier Berganda	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sistem

		<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Probolinggo</p>		<p>pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo. Variabel sistem pengendalian internal thitung 2,287 dengan tingkat signifikan 0,028. Karena thitung $2,287 > t_{tabel} 2,024$ dengan tingkat signifikan $0,028 < 0,05$. Sedangkan pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana thitung sebesar 1,414 dengan tingkat signifikan 0,166. Karena thitung $1,414 < t_{tabel} 2,024$ sedangkan tingkat signifikansi $0,166 > 0,05$. Sedangkan secara simultan variabel berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai Fhitung $> F_{tabel} 4,713 > 3,24$ dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$.</p>
6	(Sihombing, 2021)	Pengaruh Sistem Informasi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

		Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai		Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial maupun simultan
--	--	---	--	--

2.2.1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dalam mengatur keuangan daerah, dibutuhkan pengatryan sistem akuntansi untuk mengaontrol penyebaran dana anggaran dan juga bisa dipertanggungjawabkan untuk pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sasaran pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakai informasi dalam mengukur akuntabilitas dan pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk mewujudkan tujuan sasaran pelaporan keuangan, perlu diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari prosedur pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran, peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Tujuan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan dimana laporan keuangan pada akhirnya dapat menjadi informasi untuk mengukur

dan menilai kinerja pemerintah guna menggambarkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraannya. kinerja.

Dengan adanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah menjadi sarana yang dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerjanya. Dalam Erlina (2008) output yang dihasilkan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sasaran akuntabilitas, laporan keuangan yang disuguhkan berlandaskan peraturan yang tertera mencakup pendapatan, penyimpanan, dan belanja uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah mempunyai keharusan untuk mempublikasikan akuntabilitas kinerjanya terhadap masyarakat. Segala aktivitas yang menyangkut penggunaan anggaran dan penerimaan negara dapat diatur dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Bila sistem akuntansi keuangan daerah itu sudah ditetapkan dengan bagus dalam instansi pemerintah. Maka nilai dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut akan tumbuh dan dapat dilaporkan dengan terpercaya dan akuntabel.

2.2.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian

tujuan yang dihendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja. Kejelasan sasaran anggaran harus sesuai dengan spesifikasi sasaran anggaran. Kegiatan yang dilakukan spesifikasinya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Kejelasan sasaran anggaran harus memperhatikan kepentingan pada setiap program.

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kontrol antisipasi terhadap kegagalan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Sasaran anggaran pemerintah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran tersebut.

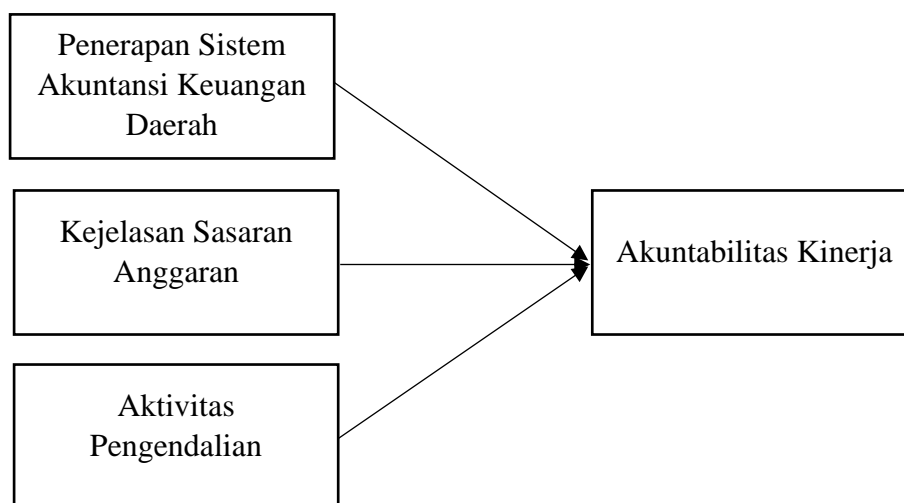
2.2.3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009) pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sedangkan menurut Paramitha (2016) pengendalian akuntansi merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu, dan menurut krismaji (2010) pengendalian akuntansi (accounting controls) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.

Untuk menjamin bahwa strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, diperlukan suatu aktivitas pengendalian yang efektif (Ningsih et al., 2010). Menurut COSO

dalam Widyaningsih (2010) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan dan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. Dalam Soleha (2014) Steinthorsdotir (2003:97) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan aspek yang sangat penting dari corporate governance. Manajemen menggunakan sistem pengendalian untuk menjamin tujuan organisasi tercapai. Pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya good corporate governance, hal tersebut menjadikan perusahaan untuk memenuhi praktek pengelolaan perusahaan yang baik.

Akuntabilitas kinerja dapat meningkat jika aktivitas pengendalian ini dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir tindakan kecurangan dan dapat mengontrol semua unit terkecil sekalipun. Hal ini agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada sehingga akuntabilitas kinerja dapat dicapai. Berdasarkan dari uraian latar belakang, kajian pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan, maka dapat di gambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Camat Medan Perjuangan.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Camat Medan Perjuangan.
3. Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan suatu pendekatan maupun subyek, sampel serta langkah-langkah penelitian, dan memiliki sumber data yang sudah jelas (Suliyanto, 2017). Metode ini dipakai untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan.

3.2. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) terdiri dari Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian, sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Akuntabilitas Kinerja. Berikut ini merupakan tabel uraian sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Variabel
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	(Mahmudi, 2016) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan	1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik. 3. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan

	dan operasi keuangan Pemerintah Daerah	berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	Menurut Sari dan Putra (2017), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka Waktu 5. Sasaran Prioritas 6. Tingkat Kesulitan 7. Koordinasi (Wulandari et al., 2017)
Aktivitas Pengendalian (X3)	Menurut Hery (2014), Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu dan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan tugas yang memadai 2. Otorisasi yang tepat 3. Dokumentasi dan catatan yang memadai 4. Pengendalian fisik atas aset 5. Pemeriksaan independen (Arens et al., 2015)
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan aktifitas/ program sekolah, dimana kinerja sekolah terdiri dari komponen input-proses-output yang secara simultan saling berkait (Trihantoyo, 2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Strategis 2. Terukur 3. Sumber daya yang efektif dan efisien 4. Mewujudkan visi dan misi 5. Sesuai target 6. Memberikan manfaat 7. Berjenjang dan berkala 8. Alat pertanggungjawaban 9. Tepat waktu

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2019) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sebuah perusahaan yang akan diteliti adalah suatu populasi, apabila perusahaan memiliki sejumlah karyawan atau subjek dan objek lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh sumber daya manusia yang berada di Kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang berjumlah 83 orang.

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Kantor Camat Medan Perjuangan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pangkat Eselon III/a	1 orang
2	Pangkat Eselon III/b	1 orang
3	Pangkat Eselon IV/a	10 orang
4	Pangkat Eselon IV/b	13 orang
5	Pegawai Biasa	20 orang
	Jumlah	45 orang

Sumber : Data Kecamatan Medan Perjuangan

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan sejumlah kecil data atau bagian yang mewakili populasi yang sedang diteliti, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang sedang diteliti. Dengan demikian, populasi merujuk pada sejumlah data yang diambil oleh peneliti dari populasi yang sedang diteliti. Menurut Arikunto, (2013) jika jumlah

populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan data populasi yang tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil keseluruhan populasi yang ada di kantor Camat Medan Perjuangan yaitu sebanyak 45 orang responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses sistematis dan standar untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2013), metode pengumpulan data merujuk pada cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Tahapan pengumpulan data memiliki peranan yang krusial dalam penelitian karena data tersebut akan digunakan untuk menanggapi permasalahan yang diajukan.

Dalam konteks penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui internet. Sugiyono (2016) membedakan dua jenis angket, yaitu angket tertutup dan terbuka. Angket tertutup adalah angket yang sudah menyediakan opsi jawaban, sehingga responden hanya perlu memilih dan menjawab sesuai dengan opsi yang disediakan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berskala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). dengan

petunjukkan penskoran respon jawaban seperti yang tertera pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3. 4 Pedoman Skor Jawaban Butir Angket

Skor Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Metode Pengolahan Data

Setelah butir-butir pertanyaan diskor dengan skala likert maka seluruh isi kuisioner tersebut disusun kedalam table distribusi skor. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.1 yang dijalankan dengan media komputer. Menurut Ghozali (2020) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Ada beberapa keunggulan pada metode PLS ini, yaitu:

1. Tidak memerlukan asumsi, data tidak harus berdistribusi normal (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat di gunakan pada model yang sama).
2. Dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relative kecil. Ini sesuai dengan jumlah sample pada penelitian ini yang relative kecil (84 sampel).

3.6.2. Analisis Outer Model

Dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (*valid dan reliable*). Uji validitas digunakan untuk menguji validitas kuesioner agar memastikan bahwa item-item pernyataan yang berada pada kuesioner penelitian ini dapat dimengerti oleh para responden. Wiyono (2011) menyebutkan bahwa validitas dapat ditentukan oleh convergent validity (outer model) dengan nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 sudah dianggap cukup. Dalam uji validitas ini, peneliti menggunakan nilai loading factor $>0,50$. Kuesioner telah disebarkan kepada 74 responden yaitu tenant JFFF. Analisa outer model untuk indikator reflektif dapat diuji melalui beberapa indikator (hair et al, 2014: 37):

1. *Convergent Validity*

Nilai convergent validity adalah nilai loading factor pada variable laten dengan indikator-indikator nya. *Convergent validity* menunjukkan tingkatan sejauhmana hasil pengukuran suatu konsep berkolarasi dengan hasil pengukuran dengan konsep lain yang secara teoritis harus berkolerasi positif. Suatu indikator dikatakan mempunyai reabilitas yang baik, jika nilai outer loading diatas 0.7 (sarwono, 2014: 44), sedangkan nilai outer loading masih dapat ditolelir hingga 0.5 dan dibawah dari nilai 0.4 dapat di drop dari analisis (Ghozali, 2018). Selain melihat outer loading, uji validitas convergent juga dapat dilakukan dengan melihat ini AVE. Jika nilai AVE di atas 0.5 maka suatu indikator telah memenuhi validitas convergent yang baik.

2. *Discriminant Validity*

Merupakan nilai cross loading factor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki discriminant yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading konstruk lainnya. Syarat untuk memenuhi syarat validitas discriminant ini adalah hasil dalam view dalam combined loading and cross loadings menunjukkan bahwa loading ke konstruk lain bernilai lebih rendah dari pada loading ke konstruk variable (Ghozali, 2018).

3. *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variable. Suatu variable dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0.7 (Ghozali, 2018). Uji Reliabilitas dengan *composite reliability* diatas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variable dapat dinyatakan reliable / memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai > 0.6 (Ghozali, 2018).

3.6.3. Analisis *Inner Model*

Analisa *Inner Model* dikenal juga sebagai analisa structural model, yang dilakukan untuk memastikan bahwa model structural yang dibangun robust dan akurat. Evaluasi inner model dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi (Vicenzo, 2016):

1. Q^2 *Predictive Relevance*

Dalam analisis PLS atau *Partial Least Square*, Q^2 kekuatan prediksi model. Nilai Q^2 Model sebesar 0.02 menunjukkan model memiliki *predictive*

relevance lemah, nilai Q^2 Model sebesar 0.15 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* moderate dan nilai Q^2 Model sebesar 0.35 menunjukkan model memiliki model *predictive relevance* kuat.

2. Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Uji model fit ini digunakan untuk mengetahui suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada uji kecocokan model dapat dilihat dari nilai SRMN model. Model PLS dinyatakan telah memenuhi criteria uji model fit jika nilai SRMN < 0.1 dan model dinyatakan perfect SRMN < 0.08

3. *Effect Size* (F^2)

Nilai f^2 yang diperoleh dapat dikategorikan dalam kategori berpengaruh kecil ($f^2 = 0.02$), berpengaruh menengah ($f^2 = 0.15$) dan berpengaruh besar ($f^2 = 0.35$).

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas atau eksogen (Y) terhadap variabel terikat atau endogen (X). Untuk regresi berganda sebaiknya menggunakan R Square yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Artinya semakin besar nilai R^2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikatnya. Sedangkan nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018).

3.6.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi (*regression*)

analysis) merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*). Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematis yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel (Suliyanto, 2017). Regresi linear berganda menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam model analisis regresi linear berganda jumlah variabel bebas yang digunakan lebih dari satu (Suliyanto, 2017).

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Akuntabilitas Kinerja
 β_0 : Konstanta
 X_1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 X_2 : Kejelasan Sasaran Anggaran
 X_3 : Aktivitas Pengendalian
 $\beta_{1,2,3}$: Kefisien regresi
 ε : *error term*

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2015: 85):

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t table:
 - a) Jika t hitung lebih kecil dari t tabel , maka H0 diterima dan H1 ditolak
 - b) Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
2. Dengan menggunakan angka probailitas signifikansi:
 - a) Jika nilai P Value < 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima
 - b) Jika nilai P Value \geq 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu bagian dari Wilayah Kota Medan yang memiliki penduduk 96.711 jiwa terdiri dari 47.774 orang laki-laki serta 48.937 orang perempuan dengan 23.188 kepala rumah tangga. Kecamatan Medan Perjuangan berbatasan langsung dengan Medan Tembung & Medan Timur di sebelah utara, Medan Area & Kota di sebelah selatan, Medan Timur di sebelah barat dan Medan Tembung di sebelah timur. Kecamatan Medan Perjuangan memiliki luas wilayah sekitar 4,56 km² dengan jarak Kantor Kecamatan Medan Perjuangan ke kantor Wali Kota Medan sekitar 6 km. Dalam bidang perindustrian, terdapat 6 industri besar sedang, 18 industri kecil dan 58 industri rumah tangga di kecamatan Medan Perjuangan. Sementara dalam bidang perdagangan terdapat 2 pasar, 18 pertokoan, 11 swalayan/mini market, 36 restoran/rumah makan, 263 warung makan/minum, 11 panti pijat/SPA, 23 tukang pangkas, dan 53 salon kecantikan. Medan perjuangan tidak jauh dari pusat kota serta dekat dengan Pasar Raya MMTC Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Outer Model (Pengukuran Model)

Evaluasi terhadap model yang indikatornya bersifat reflektif meliputi pemeriksaan sebagai berikut: (1) *Convergent Validity*, (2) *discriminant validity*, (3) *internal consistency* atau *construct reliability*, (4) *average variance extracted*, dan yang akan diuraikan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

a. *Convergent Validity*

Menurut Wiyono (2011) validitas dapat ditentukan oleh convergent validity (outer model) dengan nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 sudah dianggap cukup Dalam uji validitas ini, peneliti menggunakan nilai loading factor $>0,50$. Berdasarkan nilai outer loading dari masing-masing indikator pada variabel penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. ***Convergent Validity* Pada Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)**

Indikator konstruk pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *Convergent Validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 *Convergent Validity* Variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X1)

Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
X1_P1	0.131	0,50	Tidak Memenuhi
X1_P2	0.207	0,50	Tidak Memenuhi
X1_P3	0.224	0,50	Tidak Memenuhi
X1_P4	0.841	0,50	Memenuhi
X1_P5	0.884	0,50	Memenuhi
X1_P6	0.721	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil analisis *loading factor* dari indikator-indikator variabel Sistem Akuntansi Keuangan (X1) seperti yang tercantum, terlihat bahwa beberapa indikator (X1_P1, X1_P2, X1_P3) memiliki loading factor yang relatif rendah, yaitu di bawah kriteria yang ditetapkan (0,50). Adanya

loading factor yang rendah disebabkan oleh data yang diperoleh melalui kuesioner bervariasi.

2. *Convergent Validity* Pada Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Indikator konstruk pada variabel Sistem Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) berjumlah 14 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *Convergent Validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 *Convergent Validity* Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
X2_P1	-0.110	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P2	0.212	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P3	-0.027	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P4	0.011	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P5	0.314	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P6	0.192	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P7	0.113	0,50	Tidak Memenuhi
X2_P8	0.836	0,50	Memenuhi
X2_P9	0.917	0,50	Memenuhi
X2_P10	0.821	0,50	Memenuhi
X2_P11	0.959	0,50	Memenuhi
X2_P12	0.921	0,50	Memenuhi
X2_P13	0.911	0,50	Memenuhi
X2_P14	0.842	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil analisis *loading factor* dari indikator-indikator variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) seperti yang tercantum, terlihat bahwa sebagian besar indikator (X2_P1, X2_P2, X2_P3, X2_P4, X2_P5, X2_P6, X2_P7) memiliki *loading factor* yang relatif rendah, yaitu di bawah kriteria yang ditetapkan (0,50). *Loading factor* atau faktor pemuatan adalah

ukuran seberapa baik sebuah indikator mewakili variabel yang diukur oleh konstruk atau variabel latent tertentu dalam analisis faktor atau model struktural. Adanya *loading factor* yang rendah disebabkan oleh data yang diperoleh melalui kuesioner bervariasi.

3. *Convergent Validity* Pada Variabel Aktivitas Pengendalian (X3)

Indikator konstruk pada variabel Sistem Aktivitas Pengendalian (X3) berjumlah 14 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *Convergent Validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 *Convergent Validity* Variabel Aktivitas Pengendalian (X3)

Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
X3_P1	0.272	0,50	Tidak Memenuhi
X3_P2	0.069	0,50	Tidak Memenuhi
X3_P3	0.220	0,50	Tidak Memenuhi
X3_P4	0.009	0,50	Tidak Memenuhi
X3_P5	0.898	0,50	Memenuhi
X3_P6	0.748	0,50	Memenuhi
X3_P7	0.858	0,50	Memenuhi
X3_P8	0.793	0,50	Memenuhi
X3_P9	0.952	0,50	Memenuhi
X3_P10	0.832	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator X3_P1, X3_P2, X3_P3, dan X3_P4 memiliki *loading factor* yang rendah karena tidak cukup kuat atau relevan dalam mengukur variabel Aktivitas Pengendalian (X3). Adanya *loading factor* yang rendah disebabkan oleh data yang diperoleh melalui kuesioner bervariasi.

4. *Convergent Validity* Pada Variabel Akuntabilitas (Y)

Indikator konstruk pada variabel Sistem Akuntabilitas (Y) berjumlah 20 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *Convergent Validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 *Convergent Validity* Variabel Akuntabilitas (Y)

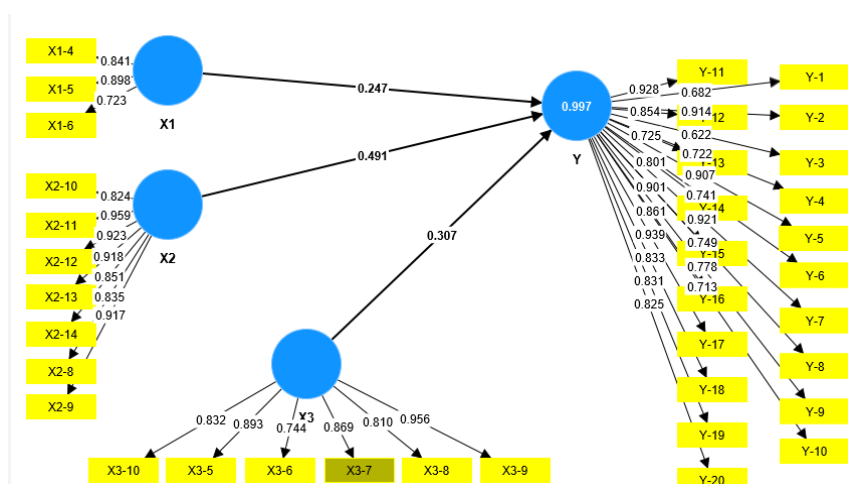
Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
Y_P1	0.682	0,50	Memenuhi
Y_P2	0.914	0,50	Memenuhi
Y_P3	0.622	0,50	Memenuhi
Y_P4	0.722	0,50	Memenuhi
Y_P5	0.907	0,50	Memenuhi
Y_P6	0.742	0,50	Memenuhi
Y_P7	0.921	0,50	Memenuhi
Y_P8	0.750	0,50	Memenuhi
Y_P9	0.778	0,50	Memenuhi
Y_P10	0.712	0,50	Memenuhi
Y_P11	0.927	0,50	Memenuhi
Y_P12	0.854	0,50	Memenuhi
Y_P13	0.725	0,50	Memenuhi
Y_P14	0.802	0,50	Memenuhi
Y_P15	0.901	0,50	Memenuhi
Y_P16	0.861	0,50	Memenuhi
Y_P17	0.939	0,50	Memenuhi
Y_P18	0.833	0,50	Memenuhi
Y_P19	0.831	0,50	Memenuhi
Y_P20	0.824	0,50	Memenuhi

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan tabel *Convergent Validity* indikator konstruk pada masing-masing variable, maka dapat dikemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel SAKD (X1) yang Tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X1_P1, X1_P2, X1_P3, dan X1_P5. Pada Variabel KSA (X2) yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X2_P1, X2_P2, X2_P3, X2_P4, X2_P5, X2_P6, X2_P7. Pada Variabel AP

(X3) yang tidak memenuhi nilai *loading factor* adalah indikator konstruk X3_P1, X3_P2, X3_P3, X3_P4.

Berdasarkan ketentuan dalam analisis *Convergent Validity*, jika suatu nilai *loading factor* dalam indikator konstruk yang tidak terpenuhi. Maka indikator konstruk tersebut harus dibuang dan dilakukan analisis kembali. Berikut hasil *convergent validity* setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi kriteria dibuang dan dilakukan pengujian kembali dikemukakan pada gambar dibawah ini yaitu:



Gambar 4.1 Outer Loading Kedua

b. *Convergent Validity*

Discriminant Validity menggunakan nilai *cross loading*. Syarat untuk memenuhi syarat validitas discriminant ini adalah hasil dalam view dalam combined loading and cross loadings menunjukkan bahwa loading ke konstruk lain bernilai lebih rendah dari pada loading ke konstruk variable (Ghozali, 2018). Hasil analisis *discriminant validity* disajikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.5 *Cross Loading*

	X1	X2	X3	Y
X1-4	0.841	0.571	0.649	0.682
X1-5	0.898	0.852	0.874	0.914
X1-6	0.723	0.479	0.688	0.622
X2-10	0.833	0.824	0.775	0.861
X2-11	0.782	0.959	0.897	0.939
X2-12	0.607	0.923	0.770	0.833
X2-13	0.646	0.918	0.759	0.831
X2-14	0.664	0.851	0.822	0.825
X2-8	0.662	0.835	0.691	0.801
X2-9	0.743	0.917	0.874	0.901
X3-10	0.653	0.885	0.832	0.854
X3-5	0.837	0.890	0.893	0.921
X3-6	0.806	0.642	0.744	0.749
X3-7	0.827	0.615	0.869	0.778
X3-8	0.682	0.631	0.810	0.713
X3-9	0.829	0.884	0.956	0.928
Y-1	0.841	0.571	0.649	0.682
Y-10	0.682	0.631	0.810	0.713
Y-11	0.829	0.884	0.956	0.928
Y-12	0.653	0.885	0.832	0.854
Y-13	0.701	0.652	0.695	0.725
Y-14	0.662	0.835	0.691	0.801
Y-15	0.743	0.917	0.874	0.901
Y-16	0.833	0.824	0.775	0.861
Y-17	0.782	0.959	0.897	0.939
Y-18	0.607	0.923	0.770	0.833
Y-19	0.646	0.918	0.759	0.831
Y-2	0.898	0.852	0.874	0.914
Y-20	0.664	0.851	0.822	0.825
Y-3	0.723	0.479	0.688	0.622
Y-4	0.661	0.697	0.678	0.722
Y-5	0.833	0.881	0.838	0.907
Y-6	0.770	0.645	0.710	0.741
Y-7	0.837	0.890	0.893	0.921
Y-8	0.806	0.642	0.744	0.749
Y-9	0.827	0.615	0.869	0.778

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Dari table diatas dapat dilihat bahwa semua loading indicator terhadap konstruk memiliki nilai lebih tinggi dari pada variabel lainnya. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model ini telah memenuhi syarat *Discriminant Validity*.

c. *Composite Reability*

Uji Reliabilitas dengan *composite reliability* diatas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variable dapat dinyatakan reliable /

memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai > 0.6 (Ghozali, 2018). Hasil analisis *Composite Validity* disajikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.6 Composite Reliability

No.	Variabel	Nilai Reabilitas Komposit	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	SAKD (X1)	0.804	0.762	Realibel
2.	KSA (X2)	0.958	0.956	Realibel
3.	AP (X3)	0.932	0.924	Realibel
4.	Akuntabilitas (Y)	0.976	0.973	Realibel

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil uji *composite reability* menunjukkan nilai reabilitas komposit variabel SAKD (X1) sebesar 0,804, variabel KSA (X2) 0,958, variabel AP (x3) 0,932, dan variabel Akuntablitas (Y) memiliki nilai 0,976 serta nilai *cronbach's alpha* pada variabel SKAD (X1) sebesar 0,762 variabel KSA (X2) 0,956 variabel AP (x3) 0,924, dan variabel Akunabilitas memiliki nilai 0,8973. Maka dapat disimpulkan dalam uji *composite reability* seluruh nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini semua variabel yang diteliti dinyatakan reliabel dan telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.

4.2.2 Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi selanjutnya dalam structural model adalah menilai *coefficient of determination* atau biasa juga disebut dengan mengevaluasi *R square* (R^2). Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Artinya semakin besar nilai R^2 maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, hal ini berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikatnya. Sedangkan nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2018).. Hasil *coefficient of determination* (R^2) dilaporkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 4.7 Model Stuktural atau Inner Model (R-Square)

	R Square	Adjusted R Square
Akuntabilitas (Y)	0,997	0,997

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil evaluasi *inner model* diketahui bahwa hasil evaluasi *inner model* melalui R-Square pada variabel Y diperoleh nilai sebesar 0,997 maka dapat dijelaskan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, dan aktivitas pengendalian dapat menjelaskan dengan baik variabel akuntabilitas dengan nilai sebesar 99,7%.

4.2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai P-Values $< 0,05$ dan memeuhi kriteria sebagai berikut:

1. $t_{\text{statiotic}} > t_{\text{tabel}}$ dan P-Values $< 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima
2. $t_{\text{statiotic}} < t_{\text{tabel}}$ dan P-Values $> 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Nilai t tabel dalam penelitian berdasarkan rumus df (*Degree of Freedom*) yaitu $n - k$, (n) merupakan jumlah responden yang diteliti dalam penelitian dan (k) adalah jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Maka, diperoleh nilai df $= n - k = 83 - 4 = 79$, diperoleh nilai t tabel yaitu 1.99045.

Tabel 4.8 Uji Hipotesis

	Sampel Asli	Rata-rata Sampel	Standar Deviasi	T Statistik	P Values
X1 → Y	0.247	0.245	0.022	11.140	0,000
X2 → Y	0.491	0.486	0.028	17.548	0.000
X3 → Y	0.307	0.315	0.030	10,244	0.000

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa pada variabel $X_1 \rightarrow Y$ menunjukkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $11.140 > t_{\text{tabel}} 1.99045$ dengan nilai P-Values sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diketahui bahwa H_1 pada penelitian ini diterima yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja pada kecamatan medan perjuanagan Kota Medan.

Hasil uji hipotesis kedua pada variabel $X_2 \rightarrow Y$ menunjukkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $17.548 > t_{\text{tabel}} 1.99045$ dengan nilai P-Values sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diketahui bahwa H_2 pada penelitian ini diterima yang berarti kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pada kecamatan medan perjuanagan Kota Medan.

Hasil uji hipotesis ketiga pada variabel $X_3 \rightarrow Y$ menunjukkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $10.244 > t_{\text{tabel}} 1.99405$ dengan nilai P-Values sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diketahui bahwa H_3 pada penelitian ini diterima yang berarti Aktifitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pada kecamatan medan perjuanagan Kota Medan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Kurnia, 2013). Pentingnya akuntabilitas laporan keuangan daerah saat ini yakni tidak dapat dipisahkan dari prinsip tata kelola pemerintahan. Penerapan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif menjadi konsekuensi yang logis. Akuntabilitas dapat memberikan laporan keuangan kepada masyarakat sehingga bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanggung jawab dari pemerintah.

Pada hasil analisis uji hipotesis, Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. hal ini terjadi dikarenakan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan akuntabilitas keuangan daerah dilakukan dengan menerapkan system akuntansi keuangan daerah yang cukup tepat. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Dewi, (2022) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah serta dilaksanakan untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan akuntabilitas keuangan.

4.3.2 Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Kinerja

Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan

misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan (Hasanah, 2021)

Pada hasil analisis uji hipotesis, Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari α yang dipakai yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan Goal Setting Theory menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik (Precelina & Wuryani, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.3.3 Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut COSO dalam Widyaningsih (2010) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan dan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. Akuntabilitas kinerja dapat meningkat jika aktivitas pengendalian ini dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisirkan tindakan kecurangan dan dapat mengontrol semua unit terkecil sekalipun. Hal ini agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada sehingga akuntabilitas kinerja dapat dicapai.

Pada hasil analisis uji hipotesis, Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari α yang dipakai yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan Aktivitas pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah, Hal ini sesuai dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manulang dan Abdullah (2019) menyatakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, diantaranya adalah pengendalian internal. Hal ini menandakan bahwa, semakin baik pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, maka semakin baik akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem akuntansi Keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, dan Aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Dengan Jumlah sampel sebanyak 83 responden.

1. Penerapan Sistem akuntansi Keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan/
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
3. Aktivas Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

5.2 Kesimpulan

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan populasi agar lebih mudah menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki hubungan cukup erat untuk berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja seperti variabel kualitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, motivasi

anggaran atau kualitas pelayanan pemerintah daerah dan tingkat kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Sari, F. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159.
- Ardiyani, N. P., & Binawati, E. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1).
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.
- Cahyati, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Skpd Di Pemerintahan Kabupaten Asahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Dan Pelatihan Kerja Seba*. Universitas Sumatera Utara.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Erlina, R. (2013). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Penerbit Brama Ardian.
- Fauzi, A. (2020). *Manajemen kinerja*. Airlangga university press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, M. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Universitas Khairun.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding Frima*, 7–

15.

- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Prosiding Seminar Nasional USM*, 2(1), 342–357.
- Hasanah, A. (2021). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI MEDAN)*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada organisasi perangkat daerah pemda Cianjur). *Star*, 11(1), 1–14.
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Kencana.
- Indraswarawati, S. A. P. A., Putra, C. G. B., & Manggala, I. P. T. J. (2020). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 80–96.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kurnia, I. (2013). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat). *LOGOS (Local Government Studies) Universitas Negeri Padang*, 1–23.
- Latifah, L., & Sabeni, A. (2007). Organizational Behavioral Factors in Regional Financial Accounting System. *SNA X, Makasar*.
- Lesmana, S., & Lufriansyah, L. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 1–13.
- Mahmudi. (2016a). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi Ketiga, Yogyakarta*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, M. (2016b). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta*.
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079.
- Mukarromah, A. A. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Probolinggo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi
- Nguyen, P. (2018). Performance implication of budgetary participation and learning goal orientation: empirical evidence from Vietnam. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 25(2), 91–111.

- Ningsih, I., Lovisai, P., & Hanum, Z. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)*. 10, 1–7.
- Pitasari, K. K. A., Sulindawati, N. L. G. E., SE Ak, M., Atmadja, A. T., & SE, A. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Keadilan Prosedural terhadap Sejangkan Anggaran (Budgetary Slack) pada SKPD berupa Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika*, 13(2), 104–116.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Putri, A. A. (2022). Dampak Sistem Informasi Akuntansi Untuk Pengendalian Internal Yang Efektif Pada Kinerja Perusahaan. *Jurnal PUSDANSI*, 1(11).
- Ramadhani, F. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Reyhan, M. H. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara)*. Universitas Sumatera Utara.
- Ronal, M. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 217.
- Sihombing, G. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai*.
- Sinambela, E. A., & Darmawan, D. (2011). Analisis Dampak Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *EBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 18–29.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.

<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Suliyanto. (2017). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Superdi, S., Rasuli, M., & Silfi, A. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)*. Riau University.
- Trihantoyo, S. (2015). Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja Syunu Trihantoyo 1 , Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. *Widyagogik*, 3(1), 90–102.
- Uppa, N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Kantor Bpkad Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2).
- Viola, I. R., Andriana, A., & Wardhaningrum, O. A. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 92–102.
- Wardani, S. A., & Dewi, S. R. (2022). The Influence of the Implementation of Accounting Information Systems, Performance-Based Budgeting Applications, and Performance Reporting Systems on the Performance Accountability of Sidoarjo Regency Government Agencies. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19, 1–9. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1269>
- Wulandari, W. R., Surya, R. A. S., & Paulus, S. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)*. Riau University.